

BPK Akui ada Penyimpangan APBD di SBB

Ambon, AE.-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku mengakui ada penyimpangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Seram Bagian Barat. Temuan ini, sepenuhnya diserahkan kepada pengguna data tersebut, yaitu Pemerintah Kabupaten SBB maupun aparat penegak hukum.

Pengakuan pihak BPK ini tentu mengejutkan, namun sekaligus menyiratkan

Baca Penyimpangan ... Hal. 6



PENYIMPANGAN ANGGARAN

Pelaksanaan pembangunan tahun 2008, Pembiayaannya baru dilakukan pada tahun anggaran 2009.

Sementara untuk tahun 2009, hingga kini belum juga dibayarkan oleh Pemkab SBB

Kondisi ini telah berlangsung sejak tahun 2007

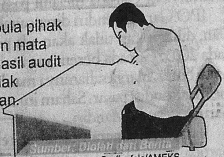
Demikian pula untuk tahun 2008 baru direalisasikan pada tahun 2009. Sudah begitu, proyek untuk tahun 2009, baru ditenderkan pada Desember 2009.

Bahkan pada 2010 proyek di 2009 tidak bisa dijamin akan diselesaikan.

DUGAAN PENYALANGJAJAAN APBD SBB

Dana itu telah didepositokan.

Diduga pula pihak BPK main mata karena hasil audit dinilai tidak transparan



Grafis: fah/AMEKS